

## ABSTRAK

**AKHMAD GAZALI, NPM : 2022005, Judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014 PASAL 9 AYAT 1 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGGUNAAN ALKOHOL DI KELURAHAN ANTASARI”** di bawah bimbingan **Bapak Dr. Irza Setiawan, S.Sos, M.AP.** Sebagai Pembimbing I dan **Ibu Ratna Sari, S.Sos, MA** Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peredaran minuman beralkohol, obat oplosan, dan zat adiktif lainnya di wilayah kabupaten hulu sungai utara, khususnya di kelurahan antasari, yaitu, Masih adanya penjual minuman oplosan beralkohol yang dapat di temui di sekitaran pasar amuntai, adanya pembeli minuman oplosan beralkohol yang masih di bawah umur untuk mabuk yang berdampak negatif seperti terjadi perkelahian dan merugikan lingkungan sekitar. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam mengatasi peredaran alkohol yang disalahgunakan oleh sebagian oknum sebagai minuman yang memabukkan sehingga maraknya penjualan minuman oplosan beralkohol di kelurahan antasari, Perda telah berlaku selama beberapa tahun, tantangan dalam implementasinya masih muncul karena masyarakat kelurahan antasari kurang mengetahui bahaya dan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan penggunaan alkohol di Kelurahan Antasari, Serta Faktor-faktor mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara purposive sampling berjumlah 15 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan implementasi belum baik. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Teori George C.Edwards III (Subianto,2020) Kemudian ditarik kesimpulan pada sub variabel Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi terdapat 11 indikator, 4 Indikator sesuai dengan teori dan 7 indikator yang tidak sesuai dengan teori. Hal tersebut dilihat dari Satpol PP yang masih belum menyalurkan informasi dan terdapat penurunan konsistensi dalam penyampaian informasi menurut masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi yaitu faktor pendukung Satpol pp yaitu adanya fasilitas dan pelatihan SDM, faktor penghambat SatPol PP kekurangan SDM. Satpol PP juga mengalami efisiensi anggaran dari pemerintah oleh karena itu pelaksanaan perda belum berjalan optimal karena anggaran dialihkan ke skala prioritas.

Berdasarkan hal tersebut maka disarankan Satpol PP agar lebih menyalurkan informasi terhadap Perda untuk mencapai kebijakan yang optimal, diperlukan pertimbangan untuk penambahan jumlah petugas. Kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam Perda ini tanpa partisipasi masyarakat kurang optimal untuk menjalankan kebijakan mengenai Perda No 4 Tahun 2014.

## ABSTRACT

**AKHMAD GAZALI, NPM: 2022005, Title: "IMPLEMENTATION OF HULU SUNGAI UTARA REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2014 ARTICLE 9 PARAGRAPH 1 CONCERNING THE PREVENTION AND USE OF ALCOHOL IN ANTASARI VILLAGE"** under the supervision of **Dr. Irza Setiawan, S.Sos, M.AP.** as Supervisor I and **Ratna Sari, S.Sos, MA** as Supervisor II.

This research is motivated by the circulation of alcoholic beverages, adulterated drugs (oplosan), and other addictive substances in the Hulu Sungai Utara Regency, specifically in Antasari Village. This is evidenced by the continued presence of sellers of adulterated alcoholic beverages around the Amuntai market and underage buyers consuming these drinks to the point of intoxication, leading to negative impacts such as brawls and public disturbances. Furthermore, a lack of government firmness in handling alcohol abuse has led to the rampant sale of adulterated drinks. Despite the Regional Regulation (Perda) being in effect for several years, implementation challenges persist because the community in Antasari Village remains under-informed about the dangers and consequences of alcohol consumption. This study aims to determine how the regional policy regarding the prohibition of alcohol and addictive substances is implemented in Antasari Village and the factors influencing it.

This study utilizes a qualitative approach with a descriptive qualitative type. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data sources were obtained through purposive sampling involving 15 respondents. The collected data were then analyzed using techniques including data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results indicate that the policy has not been implemented effectively. This study employs the implementation theory by George C. Edwards III (Subianto, 2020). Conclusions drawn from the sub-variables of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure involve 11 indicators, where 4 indicators align with the theory and 7 indicators do not. This is evident from the Civil Service Police Unit (SatPol PP) not yet effectively disseminating information, and a perceived decline in the consistency of information delivery according to the community. Factors influencing implementation include supporting factors for SatPol PP, such as available facilities and human resource training, and inhibiting factors, namely a shortage of personnel. SatPol PP also faced budget efficiency measures from the government; consequently, the implementation of the regulation has not been optimal as the budget was diverted to other priority scales.

Based on these findings, it is recommended that the Public Order Agency (Satpol PP) improve the dissemination of information regarding the Regional Regulation to achieve optimal policy outcomes; furthermore, adding more personnel should be considered. The community is also urged to participate more actively in this regulation, as without public involvement, the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2014 will not reach its full potential.